

SURVEI DAYA SAING JAWA TENGAH TAHUN 2013 SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KINERJA INVESTASI

Adi Ekopriyono

**Kapusdi Tata Kelola Perusahaan dan Pengembangan Bisnis Lembaga Penelitian
UNTAG Semarang/Koordinator Organizing Committee Survei Daya Saing Daerah
Jawa Tengah**

Email : adiekopriyono@hotmail.com

Abstrak

Survei Daya Saing, pada dasarnya memotret kabupaten/kota se-Jawa Tengah, dengan enam sub-indeks, yaitu: kinerja ekonomi, persepsi iklim bisnis, dinamika usaha, kapasitas infrastruktur, kinerja pemerintah, dan kinerja investasi. Tujuannya adalah memetakan permasalahan dunia usaha dan investasi di Jateng, sehingga dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah daerah dan para pengusaha untuk meningkatkan kinerja investasi, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Responden keseluruhannya berjumlah 2100 orang, terdiri dari 54 pengusaha di 35 kabupaten kota di Jateng (usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, dari bidang usaha manufaktur, pelayanan, dan perdagangan), serta 6 orang dari unsur pemerintah kabupaten/kota. Indikator penilaian didasarkan atas 6 sub-indeks. Data diolah dengan software khusus untuk menghitung indeks dan sub indeks dengan skala satu sampai sepuluh. Infrastruktur, Kinerja Investasi, Iklim Bisnis, Kinerja Ekonomi mengalami peningkatan, sedangkan dinamika usaha, kinerja pemerintah mengalami penurunan dibandingkan dengan survei daya saing pada tahun 2010. Peringkat lima besar tiap-tiap survei yang telah dilakukan Survey Daya saing Daerah 2013: Kabupaten Pekalongan, Kota Magelang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonosobo.

Kata Kunci: Survei daya saing, Investasi

Abstract

The Competitiveness Survey, basically photographing the districts / cities of Central Java, with six sub-indices, namely: economic performance, business climate perception, business dynamics, infrastructure capacity, government performance, and investment performance. The objective is to map the problems of business and investment in Central Java, so that it can be used as input for local governments and entrepreneurs to improve investment performance, which will encourage economic growth, reduction of unemployment and poverty, and the improvement of people's welfare. Total respondents amount as 2100 persons, consisted of 54 entrepreneurs in 35 districts or cities in Central Java (micro, small, medium and large enterprises, from manufacturing, service and trade), and 6 respondents from district / city government elements. Infrastructure, Investment Performance, Business Climate, Economic Performance has increased, while business dynamics, government performance has decreased compared to the competitiveness survey in 2010. The top five ranking of each survey has been conducted SDS 2013: Pekalongan District, Magelang City, Regency Banyumas, Sragen regency, and Wonosobo regency.

Keywords : competitiveness survey, investment

PENDAHULUAN

Serangkaian survei daya saing daerah Jawa Tengah merupakan perwujudan nyata dialog pemerintah dan swasta (*public private dialogue*), kemitraan antara pemerintah dan swasta (*public private partnership*) dalam upaya meningkatkan daya saing kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Survei pertama kali dilakukan pada tahun 2007 berupa Survei Iklim Usaha (*Business Climate Survey*) yang diinisiasi oleh lembaga kerja sama teknik Pemerintah Indonesia dan Jerman, GTZ-Red, bekerja sama dengan Harian Suara Merdeka, didukung oleh Kadin Jawa Tengah. Survei tersebut kemudian digabung dengan kegiatan Pro-Investasi yang diadakan oleh Badan Penanaman Modal Daerah (sekarang: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - DPMPTSP) Jawa Tengah, menjadi Survei Daya Saing Daerah (SDSD) Jawa Tengah yang diselenggarakan tahun 2010. Kerja sama terus berlanjut, melibatkan beberapa lembaga pemerintah dan swasta di Jawa Tengah, yaitu DPMPTSP, Bappeda, Bank Indonesia Kanwil V Jawa Tengah, Budi Santoso Foundation (BSF) dan Suara Merdeka, serta GTZ-Red. Untuk memantau responsivitas kabupaten/kota, pada tahun 2011 diselenggarakan Survei Snapshot (SS), dilanjutkan Survei Investasi (SI) tahun 2012 yang menitikberatkan pada indeks kinerja investasi kabupaten/kota, Survei Daya Saing Daerah 2013 (Ekopriyono, 2013)

Survei Daya Saing, pada dasarnya memotret kabupaten/kota se-Jawa Tengah, dengan enam sub-indeks, yaitu: kinerja ekonomi, persepsi iklim bisnis, dinamika usaha, kapasitas infrastruktur, kinerja pemerintah, dan kinerja investasi (Annynous, 2012; BI, 2010)

Kinerja ekonomi mengukur kinerja sistem ekonomi makro, dengan indikator-indikator, yaitu pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per kapita, pertumbuhan per kapita, tingkat

pengangguran, pertumbuhan total penyaluran kredit, dan tingkat kredit macet.

Persepsi iklim usaha diambil sepenuhnya dari data primer, yaitu hasil wawancara langsung dengan para pengusaha, mencakup penilaian dunia usaha terhadap kondisi iklim usaha dan investasi suatu daerah dan prospeknya di masa depan. Indikator-indikator: hambatan utama usaha, kondisi usaha dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, perkiraan kondisi usaha dua tahun ke depan, persentase keanggotaan dalam organisasi usaha, konsistensi perilaku pejabat pemerintah, jumlah regulasi bermasalah, kebutuhan “biaya tidak resmi” (pungutan liar – pungli), penilaian lingkungan usaha.

Dinamika usaha disusun sepenuhnya dari hasil wawancara langsung dengan pengusaha. Sub-indeks ini menunjukkan kondisi kapasitas perusahaan, seperti omzet, kebutuhan kredit, potensi perusahaan untuk berinovasi. Indikator-indikator: persentase usaha yang berusia di bawah 10 tahun, persentase usaha dengan *turn-over* lebih Rp 500 juta, kebutuhan pendanaan, tingkat pengajuan pinjaman persentase perusahaan yang inovatif.

Infrastruktur berbasis pada data statistik dan sebagian kecil persepsi pengusaha; menilai kualitas, akses terhadap infrastruktur dasar (misalnya jalan kabupaten/kota) dan lembaga pendukung bisnis (misalnya lembaga pelatihan, perbankan, dan pasar). Indikator-indikator: jalan daerah beraspal/total jalan daerah, penilaian terhadap pemeliharaan dan pengembangan, jumlah pasar per seribu penduduk, jumlah lembaga pelatihan kejuruan dan penilaian kualitasnya, jumlah lembaga keuangan per seribu penduduk.

Kinerja pemerintah terdiri dari kapasitas pemerintah dan upaya pemerintah. Kapasitas pemerintah berbasis pada sumber data statistik yang fokus pada kemampuan kapasitas fiskal daerah dalam mendorong pembangunan. Indikator-indikator: anggaran per kapita, pendapatan

asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan (dalam persen), peningkatan PAD (dalam persen), belanja pembangunan per kapita, kenaikan belanja pembangunan per kapita. Upaya pemerintah mencakup penilaian tentang usaha pemerintah dalam melaksanakan promosi investasi, kualitas layanan perizinan, jumlah regulasi pro-investasi berdasarkan persepsi pemerintah daerah sendiri dan persepsi pengusaha. Indikator-indikator: studi terbaru peluang investasi, materi promosi investasi, frekuensi/kualitas ekspor yang difasilitasi pemerintah, penilaian terhadap kualitas ekspo pemerintah, kualitas kinerja pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)), persentase perusahaan yang memiliki tanda daftar perusahaan (TDP), rata-rata jumlah hari yang diperlukan mengurus TPD dan surat izin usaha perusahaan (SIUP), kualitas pendukung investasi, anggaran promosi investasi, jumlah regulasi baru terkait pajak, perizinan, insentif, tenaga kerja dan lingkungan yang mempermudah investasi.

Kinerja investasi dianalisis berdasarkan perspektif atau opini dunia usaha dan juga opini pemerintah. Indikator-indikator: realisasi investasi per anggaran promosi, realisasi investasi per kapita, persentase perusahaan yang berinvestasi, rata-rata nilai investasi, rata-rata rekrutmen tenaga kerja, persentase perusahaan yang berinvestasi 12 bulan ke depan, nilai investasi per perusahaan, rata-rata rekrutmen tenaga kerja per perusahaan, penilaian terhadap daya tarik investasi daerah.

Survei Daya Saing diharapkan mendorong pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan para pengusaha untuk berupaya dengan sungguh-sungguh meningkatkan kinerja, menyediakan iklim investasi yang kondusif. Survei ini merupakan cermin bagi pemerintah daerah maupun pengusaha, sehingga mengetahui posisi daerahnya.

Tujuan dan hasil yang diharapkan survei daya saing daerah adalah (BI, 2010; Ekopriyono, 2013) :

1. Menyediakan data monitoring tentang perkembangan daerah terkait iklim investasi dan bisnis daerah tingkat dua di Jawa Tengah,
2. Menyediakan data kinerja pemerintah maupun swasta dalam upaya meningkatkan daya saing daerah tingkat dua di Jawa Tengah,
3. Sebagai instrumen monitoring: Menyediakan data monitoring perkembangan daerah terkait dengan perubahan iklim investasi dan iklim bisnis. Mengukur kualitas tata kelola ekonomi daerah antar-kabupaten/kota maupun wilayah.
4. Sebagai instrumen pembangunan: Menciptakan peringkat daya saing, yang dapat memotivasi persaingan secara sehat antar-kabupaten/kota maupun eks karesidenan. Menstimulasi peningkatan upaya perbaikan kinerja pemerintah kabupaten/kota dan pengusaha melalui sistem kompetisi yang sehat.
5. Sebagai masukan untuk menyusun kebijakan: Hasil survei dapat digunakan oleh dunia usaha untuk melaksanakan advokasi kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat. Hasil survei dapat digunakan oleh pemerintah untuk membuat perubahan kebijakan secara tepat.

Hasil yang diharapkan dari survei daya saing adalah:

1. Analisis dan penyebaran informasi detil serta relevan mengenai daya saing tiap-tiap kabupaten/kota
2. Sorotan terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan oleh tiap-tiap kabupaten/kota
3. Diseminasi yang efisien terhadap hasil survei diharapkan dapat memengaruhi secara positif pengambil kebijakan di tingkat kabupatn/kota dan provinsi

4. Kebersinambungan melalui rasa memiliki, kolaborasi, dan kontribusi dari anggota *steering committee* (SC) penyelenggara, sehingga mendorong pelaksanaan survei secara reguler
5. Peringkat kabupaten/kota dan penghargaan daya saing daerah akan menumbuhkan insentif bagi kabupaten/kota untuk memperbaiki kinerja ekonomi dan investasi.

Survei Daya Saing Daerah Jawa Tengah 2013 diluncurkan pada Selasa 2 Juli 2013, ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan oleh penyelenggara, yaitu Ir. Budi Santoso (Pendiri/Pembina Budi Santoso Foundation); Sutikno (Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Kanwil V Jateng/DIY); Herru Setiadhie, SH, MSI (Kepala Bappeda Jateng); Ir. Yuni Astuti, MA (Kepala BPMD Jateng); dan Frank Bertelmann (GIZ Red, lembaga kerja sama teknis Indonesia-Jerman).

Survei Daya Saing Daerah (SDSD) Jateng 2013 merupakan kelanjutan serangkaian survei yang telah dilaksanakan sebelumnya, yaitu Survei Iklim Usaha (*Business Climate Survey – BCS* 2007), SDSD 2010, Survei Snapshot 2011, dan Survei Investasi 2012. Survei-survei tersebut bertujuan memetakan permasalahan dunia usaha dan investasi di Jateng, sehingga dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah daerah dan para pengusaha untuk meningkatkan kinerja investasi, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Survei menggunakan pendekatan/metode proporsional (*strata* survei), dimana total responden masing-masing kabupaten/kota adalah sama rata atau proporsional di masing-masing Kabupaten/Kota.

Responden keseluruhannya berjumlah 2100 orang, terdiri dari 54 pengusaha di 35 kabupaten kota di Jateng (usaha

mikro, kecil, menengah, dan besar, dari bidang usaha manufaktur, pelayanan, dan perdagangan), serta 6 orang dari unsur pemerintah kabupaten/kota. Indikator penilaian didasarkan atas 6 sub-indeks, yaitu: Kinerja ekonomi, persepsi iklim bisnis, kinerja investasi, kinerja pemerintah, dinamika bisnis, dan kapasitas infrastruktur. Kategori skala usaha didasarkan atas kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) yang menggunakan terminologi skala usaha berdasarkan tenaga kerja tetap. Kategori sektor didasarkan pada besaran kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Data diperoleh dari wawancara langsung (*face to face*) yang dilakukan oleh *surveyor* yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Ada dua jenis data yang diperoleh dalam survei ini, yaitu data kuantitatif (statistik) dan data kualitatif (persepsi pengusaha dan pemerintah).

Data diolah dengan software khusus untuk menghitung indeks dan sub indeks dengan skala satu sampai sepuluh. Setelah dilakukan validasi dan *inputting* data, dilakukan pengolahan/analisis data yang masuk. Hasilnya adalah pemeringkatan daya saing kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dijabarkan pada skor median pada masing-masing sub indeks, yaitu: Dinamika Usaha, Infrastruktur, Kinerja Pemerintah, Kinerja Investasi, Iklim Bisnis, Kinerja Ekonomi.

Dinamika Usaha

Skor median Jawa Tengah terjadi penurunan dari 5.84 (2010) menjadi 5.59 (2013). Penyebab utama turunnya skor median Jateng dalam indeks Dinamika Bisnis disebabkan oleh cukup rendahnya persentase jumlah usaha yang inovatif.

Infrastruktur

Skor median Jawa Tengah mengalami peningkatan sebesar 0.40 dari tahun 2010 (4.48) ke tahun 2013 (4.88). Namun demikian jumlah Kab/Kota yang berada di bawah median Jateng masih sama, yakni sebanyak 17 Kab/Kota. Peningkatan skor sub indeks Infrastruktur di tingkat Provinsi dikontribusikan oleh: adanya persepsi positif dari dunia usaha tentang penilaian terhadap perencanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan rasio ketersediaan lembaga vokasi & persepsi tentang penilaian kualitas

Kinerja Pemerintah

Skor median Jateng mengalami penurunan dari 4.57 (2010) menjadi 4.19 (2013), hal ini terjadi karena penurunan skor pada kapasitas pemerintah (▼0.66) dan sedikit perubahan skor pada upaya pemerintah (▼0.05). Penurunan pada sub-indeks kapasitas pemerintah dari 3.52 (2010) menjadi 2.86 (2013) dikontribusikan cukup signifikan oleh: penurunan skor (▼5.73) yang cukup drastis oleh % peningkatan PAD dari 8.21 (2010) menjadi 2.48 (2013) dan tahun 2013 ini 5 indikator dari sub-indeks ini perlu menjadi perhatian serius untuk ditingkatkan. Sementara pada sub-indeks upaya pemerintah, penurunan dikontribusikan oleh kualitas kinerja OSS (▼3.74) serta hasil tahun 2013, empat 4 dari 10 indikator dalam sub indeks ini perlu diperhatikan secara serius bagi perbaikan adalah: penilaian terhadap kualitas program dukungan pemerintah untuk investasi, penilaian sarana prasarana pendukung investasi, ersentase alokasi anggaran layanan investasi, serta frekuensi dan kualitas pameran yang diselenggarakan oleh Pemda

Kinerja Investasi

Skor median Jawa Tengah mengalami kenaikan dari 2.12 (2010) menjadi 2.68 (2013) yang didukung cukup signifikan oleh peningkatan persepsi positif tentang potensi Jawa Tengah yang

menarik bagi investasi. Namun demikian 8 dari 9 indikator yang ada perlu diperhatikan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah guna mendorong Kab/Kota untuk memperbaiki dalam hal: rasio realisasi investasi per anggaran belanja modal pemerintah, rasio realisasi nilai investasi per kapita, masih rendahnya investasi padat modal maupun, investasi padat karya, stagnansi usaha yang sudah ada melakukan investasi (investasi yang telah lalu maupun ke depan). Rendahnya skor kinerja investasi bukan hanya merupakan keprihatinan Demak, melainkan juga keprihatinan seluruh kabupaten/kota di Jateng. Skor tertinggi (Brebes) hanya mencapai angka 3,85. Adapun skor terendah (Pemalang) hanya 1,63.

Iklm Bisnis

Skor median Jateng mengalami peningkatan dari 5.09 (2010) menjadi 6.33 (2013), hal ini dikontribusikan cukup signifikan oleh 5 dari 8 indikator, a.l: Masifnya penurunan masalah regulasi yang menghambat di Jateng, optimisme dunia usaha terhadap kondisi bisnisnya dalam dua tahun mendatang, persepsi positif dunia usaha terhadap konsistensi pemerintah, kondisi bisnis dunia usaha saat ini dibanding dua tahun lalu maupun persepsi tentang perubahan iklim bisnis dalam dua tahun terakhir. Sementara hal-hal yang perlu diperhatikan untuk perbaikan adalah kinerja dari asosiasi bisnis, upaya memerangi pungli, serta bagaimana mempersiapkan diri dalam mengelola masalah dunia usaha.

Kinerja Ekonomi

Skor median Jateng mengalami peningkatan dari 5.14 (2010) menjadi 5.48 (2013) yang dikontribusikan oleh 2 dari 6 indikator, rendahnya rerata NPL (↗1.30 points) dan rerata tingkat pengangguran (↗0.23). Namun dari scope provinsi, terdapat 2 indikator yang perlu diperhatikan untuk perbaikan dari hasil SDSD 2013, yakni: bagaimana

meningkatkan PDRB per kapita atau pemerataan distribusi dari surplus PDRB, serta bagaimana meningkatkan pertumbuhan kredit bagi dunia usaha

PENUTUP

Kesimpulan

Tantangan utama Jawa Tengah adalah: meningkatkan kinerja investasi, pembenahan infrastruktur (baik fisik maupun nonfisik), dan kinerja pemerintah. Dari serangkaian survei tersebut ditemukan, bahwa kelemahan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah merupakan kendala pembangunan daerah. Peringkat lima besar tiap-tiap survei yang telah dilakukan SDSD 2013: Kabupaten Pekalongan, Kota Magelang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonosobo.

Saran

Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah perlu meningkatkan responsivitas terhadap kondisi yang ada, antara lain yang terlihat dari hasil survei. Pemerintah kabupaten/kota perlu meningkatkan upaya konkret (produktif dan kreatif) dalam menarik investor.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia. (2010). Survei Daya Saing (SDS) 2010 Di Jawa Tengah. Diakses melalui :

<http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/jateng/Documents/7e8fe6b8c2504b16a47adcf048eb4c35BOKSSurveiDayaSaingDaerahJawaTengah2010.pdf>

Ekopriyono, A. (2013). *Tantangan Investasi Jateng: Pembenahan Infrastruktur dan Reformasi Birokrasi*, Jurnal Ilmiah Untag Semarang, Vol 2.(3), pp. 27-46.

Ira Irawati, Zulfadly Urufi, dan Renato Everardo Isaias Rezza Resobeoen, Agus Setiawan, Aryanto. (2008). Pengukuran Tingkat Daya Saing Daerah Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah, Variabel Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam, Serta Variabel Sumber Daya Manusia Di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Prosiding INSAHP5*, Teknik Industri UNDIP

Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). (2014). Laporan Analisis Daya Saing UMKM Di Indonesia. Diakses melalui :

https://www.bappenas.go.id/files/5914/4255/9402/Laporan_Analisis_Daya_Saing_UMKM_di_Indonesia.pdf

Sutikno dan Maryunani. (2007). *Analisa Potensi Daya Saing Kecamatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Satuan Wilayah Pengembang (SWP) Kabupaten Malang*, Journal of Indonesian Applied Economics, Vol.1 (1), pp. 1-17